

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Sosialisasi Politik**

###### **a. Pengertian Sosialisasi Politik**

Herbert Hyman (dalam Sunatra, 2016, hlm. 189), bukunya yang sangat terkenal *Political Socialization: A study in the Psychology of Political Behavior* banyak dijadikan acuan dalam menganalisis perilaku politik. Hyman memaparkan bagaimana proses sosialisasi politik, proses berfikir dan bertindak politik seseorang merupakan produk pengaruh masa peserta didik, seperti bimbingan dan pengasuhan orang tua tentang nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan komunitas dan keluarga. Pola tingkah laku dan berfikir yang telah tertanam tersebut akan berubah sesuai dengan situasi yang dihadapi sebagai dampak dari sosialisasi politik. Sosialisasi itu dapat mendorong perubahan politik, baik secara konstitusional maupun perubahan yang paling keras, yaitu revolusi.

Proses sosialisasi dikondisikan untuk menghargai prestasi individu, keadilan, persamaan sosial (sosial equality), budi pekerti, moral, hukum dan tata pergaulan dalam masyarakat, keadilan, sifat kerja keras, menghargai waktu, motivasi dan hal-hal berhubungan dengan norma dasar penyelenggaraan pemerintahan. Kebebasan untuk mewujudkan hal tersebut dalam implementasinya masih terjadi ketidakadilan, ketimpangan dan tidak konsisten antara yang diajarkan dengan kondisi yang sebenarnya, misalnya di Fakultas Hukum diajarkan tentang jahatnya korupsi, tetapi dalam praktek orang bangga menjadi koruptor, bahkan ironisnya penegak hukum (oknum) terlibat kasus korupsi, suap dan mafia peradilan. Ini paradok antara hal yang bersifat normatif dengan yang bersifat empirik. Oleh karena itu, ego masing-masing sosialisasi politik berkaitan dengan kemampuan kognitif umum dan daya nalar yang terus meningkat seiring dengan penambahan usia. Sebelum mencapai usia lima tahun, hal-hal spesifik mengenai sosialisasi politik belum terlihat. Artinya, pada tingkat usia ini belum ada kesadaran kognitif mengenai

peranan pemerintah atau peranan politik. Pra dewasa dapat di bagi ke dalam tiga rentang usia : (1) masa kanak-kanak dini (lima sampai sembilan tahun)' (2) masa akhir kanak-kanak (sembilan sampai tiga belas tahun); dan (3) masa remaja (biasanya tiga belas hingga delapan belas tahun).

Sosialisasi politik mencakup bukan hanya pemahaman pemikiran ideologi, melainkan juga mencakup perolehan tingkat partisipasi atau keterlibatan tertentu dalam kehidupan politik. Partisipasi berkisar dari tinggi rendahnya dan berkaitan ketersediaan model peran, yaitu orang lain yang digeneralisir, biasanya politisi yang terlibat dalam proses politik. Keterlibatan politik berkaitan dengan perbedaan golongan, agama, usia, jenis kelamin, dan kepentingan.

Dalam kegiatan sosialisasi politik dikenal yang namanya agen. Agen inilah yang melakukan kegiatan memberi pengaruh kepada individu. Rush dan Althoff menggariskan terdapatnya 5 agen sosialisasi politik yang umum diketahui, yaitu :

- 1) Keluarga
- 2) Sekolah
- 3) *Peer groups*
- 4) Media massa
- 5) Pemerintah
- 6) Partai politik

Keluarga merupakan *primary group* dan agen sosialisasi utama yang membentuk karakter politik individu oleh sebab mereka adalah lembaga sosial yang paling dekat. Peran ayah, ibu, saudara, memberi pengaruh yang tidak kecil terhadap pandangan politik satu individu. Tokoh Sukarno misalnya, memperoleh nilai-nilai penentangan terhadap Belanda melalui ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai. Ibunya, yang merupakan keluarga bangsawan Bali menceritakan kepahlawanan raja-raja Bali dalam menentang Belanda di saat mereka tengah berbicara. Cerita-cerita tersebut menumbuhkan kesadaran dan semangat Sukarno untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsanya yang terjajah oleh Belanda.

Sekolah juga menempati posisi penting sebagai agen sosialisasi politik. Sekolah merupakan *secondary group*. Kebanyakan dari kita mengetahui lagu kebangsaan, dasar negara, pemerintah yang ada, dari sekolah. Oleh sebab itu,

sistem pendidikan nasional selalu tidak terlepas dari pantauan negara oleh sebab peran pentingnya ini.

Agen sosialisasi politik lainnya adalah *peer group*. *Peer group* masuk kategori agen sosialisasi politik *primary group*. *Peer group* adalah teman-teman sebaya yang mengelilingi seorang individu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman sebaya tentu sangat mempengaruhi beberapa tindakan kita, bukan ? Tokoh semacam Moh. Hatta banyak memiliki pandangan-pandangan yang sosialisitik saat ia bergaul dengan teman-temannya di bangku kuliah di Negeri Belanda. Melalui kegiatannya dengan teman sebaya tersebut, Hatta mampu mengeluarkan konsep koperasi sebagai lembaga ekonomi khas Indonesia di kemudian hari. Demikian pula pandangannya atas sistem politik demokrasi yang bersimpangan jalan dengan Sukarno di masa kemudian.

Media massa merupakan agen sosialisasi politik *secondary group*. Tidak perlu disebutkan lagi pengaruh media massa terhadap seseorang individu. Berita-berita yang dikemas dalam media audio visual (televisi), surat kabar, media cetak, internet, ataupun radio, yang berisikan perilaku pemerintah ataupun partai politik banyak mempengaruhi kita. Meskipun tidak memiliki kedalaman, tetapi media massa mampu menyita perhatian individu oleh sebab sifatnya yang terkadang menarik atau cenderung 'berlebihan'.

Pemerintah merupakan agen sosialisasi politik *secondary group*. Pemerintah merupakan agen yang mempunyai kepentingan langsung atas sosialisasi politik. Pemerintah yang menjalankan sistem politik dan stabilitasnya. Pemerintah biasanya melibatkan diri dalam politik pendidikan, dimana beberapa mata pelajaran ditujukan untuk memperkenalkan siswa kepada sistem politik negara, pemimpin, lagu kebangsaan, dan sejenisnya. Pemerintah juga, secara tidak langsung, melakukan sosialisasi politik melalui tindakan-tindakannya. Melalui tindakan pemerintahan, orientasi afektif individu bisa terpengaruh dan ini mempengaruhi budaya politiknya.

Partai politik adalah agen sosialisasi *secondary group*. Partai politik biasanya membawakan kepentingan nilai spesifik dari warga negara, seperti agama, kebudayaan, keadilan, nasionalisme, dan sejenisnya. Melalui partai politik dan kegiatannya, individu dapat mengetahui kegiatan politik di negara, pemimpin-pemimpin baru, dan kebijakan-kebijakan yang ada.

Minat politik cukup besar pada usia 13 tahun dan memuncak pada usia sekolah lanjutan. Hyman menegaskan, permulaan partisipasi harus diselidiki pada tahun-tahun awal anak berusia 16 tahun. Minat terhadap berita dan identifikasi digunakan sebagai indikator partisipasi. Segal menyatakan, orientasi dan perilaku politik dipelajari bukan hanya dalam pranata politik saja, melainkan juga diluar konteks politik. Peserta-peserta tidak terlibat secara langsung dalam politik, mereka dapat menjadi anggota organisasi yang berkecimpung dalam berbagai organisasi sukarela, termasuk didalam organisasi peserta didik, misalnya OSIS di SMP dan SMA atau BEM di Perguruan Tinggi. Pelatihan formal, seperti latihan kepemimpinan pemuda atau mahasiswa kurang signifikan dalam membentuk keterlibatan politik dibandingkan dengan peranan dan hubungan-hubungan yang alamiah di dalam sistem persekolahan atau pendidikan.

Segal menyimpulkan, remaja memiliki pilihan dalam menentukan sikap politiknya, para remaja cenderung mendukung partai yang didukung orang tuanya atau tidak membuat pilihan dalam dunia sosial mereka sendiri. Masing-masing generasi menentukan pilihan politik yang berbeda dan perbedaan itu tercermin dalam berbagai ideologi politik, misalnya komunisme, sosialisme, liberalisme, konservatisme atau teologis.

#### **b. Tujuan Sosialisasi Politik**

Sosialisasi politik merupakan instrumen yang berupaya melestarikan sebuah sistem politik. Melalui serangkaian mekanisme dalam sosialisasi politik, individu dari generasi selanjutnya dididik untuk memahami apa, bagaimana, dan untuk apa sistem politik yang berlangsung di negaranya masing-masing berfungsi untuk diri mereka.

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat dalam menjalani kehidupan politik. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun kehidupan masyarakat. Sosialisasi dapat dibagi kedalam 2 bagian, yaitu sebagai berikut :

### 1) Pendidikan Politik

Suatu proses dialog antara pemberi dan penerima pesan, melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai, norma, dan simbol politik dari berbagai pihak sistem politik, seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

### 2) Indroktinasi Politik

Proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa, melalui berbagai forum pengarahan yang penuh paksaan psikologis, dan latihan penuh disiplin. Partai politik dalam sistem totaliter melaksanakan indroktinasi politik.

Sosialisasi yang baik adalah melalui jalan pendidikan politik karena dapat mendorong untuk berubah dari budaya politik prokial-kaula menjadi budaya politik partisipan. Budaya politik partisipan membutuhkan partisipan yang aktif dari anggota masyarakat.

### c. Materi Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik mengandung arti adanya penurunan/penerusan nilai-nilai dari satu kegenerasi ke generasi yang lain, dari yang muda ke yang lebih tua demikian seterusnya, dengan *end result* adanya pengertian dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini menunjukkan adanya satu proses pembelajaran sosial selama proses sosialisasi. Sosialisasi terkait dengan upaya menurunkan nilai dari individu kemasyarakat maupun sebaliknya. Sosialisasi politik dapat dilakukan oleh agen-agen sosialisasi dalam masyarakat, sehingga yang menjadi permasalahan adalah siapakah yang dapat menjadi agen-agen sosialisasi politik.

Dalam penyerapan nilai-nilai, adalah merupakan hal yang wajar jika masih terdapat upaya penyerapan nilai-nilai dari generasi ke generasi dengan cara-cara yang konvensional. Penyerapan terhadap nilai-nilai dengan kondisi masyarakat yang demikian dilakukan dengan cara yang pelan-pelan serta memerlukan waktu yang sangat panjang. Bagaimana mungkin seseorang dengan kebudayaan parokial, dapat menyerap nilai-nilai dengan baik tanpa mengerti apa yang harus dilakukan dengan situasi yang terjadi dalam perpolitikan Indonesia. Terdapat dua bentuk pemikiran utama yang ingin disampaikan oleh nilai pancasila kepada masyarakat Indonesia yang majemuk

dengan kompleksitas permasalahan sebagai sebuah bangsa, yaitu pembangunan konsep kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan/ perwakilan dan proses pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Perkembangan Indonesia sebagai satu negara demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi bangsa Indonesia ialah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial dan politik yang demokrasi dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adat budayanya. Masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik dengan kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta *character and nation building*, dengan partisipasi rakyat, sekaligus menghindarkan diktator perorangan, partai ataupun militer. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam empat periode :

- 1) Periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kesatuan konstruktif sebuah kemerdekaan.
- 2) Periode 1959-1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dan demokrasi konstitusional dan lebih banyak menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur politik, semakin meluas.
- 3) Periode 1966-1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/ MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun, dalam perkembangannya peran demokrasi terpimpin. Namun, dalam perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara lain.

- 4) Periode 1999-sekarang, masa demokrasi Pancasila era Reformasi dengan berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Perkembangan berikutnya masih akan kita tunggu.
- 5) Salah satu hal penting dalam gelora reformasi di Indonesia pada tahun 1998 adalah bagaimana masyarakat dan mahasiswa mampu mengubah dan mendobrak sistem politik orde baru yang telah berkuasa selama 32 tahun.

Gambaran ini menunjukkan bahwa sistem politik dalam penyelenggaraan negara sangat berpengaruh terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat suatu negara. Sistem politik dan pemerintahan yang bersifat totaliter, oligarkhis dan hegemoni atas seluruh ruang publik berubah menjadi sistem politik demokratis berdasarkan kemurnian Pancasila dan UUD 1945 serta esensi reformasi dalam segala bidang kehidupan.

Dinamika politik lokal (daerah) mau tidak mau akan terbingkai oleh perubahan politik yang dirancang pada aras nasional. Hal ini nampak terjadi misalnya adanya perubahan konstitusional melalui serangkaian amandemen pada UUD 1945, maka pada akhirnya akan bermuara pada perubahan tatanan politik dan pemerintahan yang sangat mendasar. Dalam UUD 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan tidak lagi dilaksanakan oleh MPR. Konstitusi kita mengamanatkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat ini mengacu pada UUD. Dalam hal pengisian jabatan publik (rerutmen publik) setiap lembaga perwakilan publik (DPR, DPD dan DPRD) serta presiden harus dilakukan melalui pemilu. Kaitannya dengan perubahan mendasar dalam system konstitusi di Negara Indonesia ini, maka partisipasi masyarakat merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan dalam perubahan sosial menuju demokrasi.

Fenomena yang sering terjadi dalam pembelajaran politik masyarakat melalui Pemilu Presiden dan legisltave serta pilkada langsung, sejatinya menjadi barometer bagi kedewasaan sikap dan budaya politik masyarakat, namu pada kenyataanya elitisme dan sentralisme partai politik masih

cukup kuat mewarnai dalam pencalonan pimpinan (terutama di daerah) sehingga ia menutup peluang bagi munculnya calon dari bawah secara kualitas dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi seperti ini menjadi masalah tatkala kesadaran politik dan partisipasi masyarakat menjadi prioritas utama dalam berdemokrasi. Menurut AM Fatwa (2005) Proses Pemberdayaan Politik Masyarakat (*civil Society*) yang berjalan selama ini menjadi semakin terbengkalai karena adanya hasrat dan syahwat politik yang mematikan potensi tumbuhnya pimpinan dari bawah. Jalan pintas yang ditempuh oleh para calon kepala daerah, misalnya, melalui money politik, semakin memperpanjang jarak masyarakat dengan politik. Artinya justru keadaan seperti ini semakin melemahkan semangat masyarakat dalam kesadaran berpartisipasi politik.

Lemahnya kesadaran partisipasi politik masyarakat setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor :

- 1) Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga keterlibatan mereka dalam pemilu, penentuan kebijakan politik atau dalam pemilihan kepala daerah, bukan karena kesadaran berpartisipasi politik, melainkan lebih karena dimobilisasi. Kebanyakan dari mereka pada saat menentukan pilihannya lebih disebabkan karena pertimbangan emosi dan psikologis.
- 2) Dalam hal kasus pemilihan kepala daerah, terjadi kecenderungan bahwa tidak adanya calon-calon pimpinan daerah yang dimiliki oleh partai politik yang betul-betul memiliki akar massa dan tumbuh dari bawah. Kondisi ini mengakibatkan partai politik untuk melakukan pendekatan khusus untuk menarik hati masyarakat dan mengontrol sang calon. Maka, biasanya money politik cenderung akan dilakukan. Dan hal ini semakin memperburuk bagi pembelajaran politik masyarakat.

#### **d. Metode Sosialisasi Politik**

Metode sosialisasi politik dapat dibedakan ke dalam dua bentuk metode, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Metode pertama yang diaplikasikan melalui suatu proses dialog sehingga masyarakat memperoleh nilai, norma, dan simbol politik. Metode yang kedua, lebih merupakan proses yang terjadi secara sepihak manakala seorang penguasa

memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai-nilai, norma, dan simbol politik yang dianggap oleh pihak yang berkuasa ideal dan baik. Galibnya, pendidikan politik adalah metode yang digunakan oleh negara-negara demokratis sedangkan indoktrinasi adalah metode dari negara fasis dan negara komunis.

Metode sosialisasi dapat berupa pendidikan politik dan indoktrinasi politik.

- 1) Pendidikan politik melalui suatu proses dialog sehingga masyarakat memperoleh nilai, norma, dan simbol politik. Pada umumnya metode ini digunakan oleh negara-negara demokrasi.
- 2) Indoktrinasi politik ialah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai-nilai, norma, dan simbol politik yang dianggap oleh pihak yang berkuasa ideal dan baik. negara fasis dan negara komunis pada umumnya menggunakan cara-cara seperti ini.

## **2. Kesadaran Politik**

### **a. Pengertian Kesadaran Politik**

Kesadaran politik adalah sebuah kesadaran yang harus dimiliki oleh warga negara tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara bagaimana bisa menyikapi masalah politik yang ada dilingkup kebijakan Negara dan Pemerintah. Sedangkan sosialisasi politik adalah proses bagaimana orang bisa mengenal atau mengetahui atau bisa tanggap dengan sistem politik yang ada serta punya reaksi terhadap adanya gejala politik. Dengan adanya kesadaran politik yang ada pada diri masyarakat secara otomatis akan mendukung sekali proses adanya sosialisasi politik yang dilakukan, maka kita sebagai warga negara atau sebagai individu tentunya minimal akan paham mengenai masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat politis, dengan seperti itu maka akan mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik atau pengetahuan dalam berpolitik.

Secara harfiah 'kesadaran' berasal dari kata 'sadar', yang berarti insyaf, merasa, tahu, mengerti. Jadi, kesadaran atau keinsyafan atau merasa mengerti atau memahami segala sesuatu. Kesadaran mempunyai dua komponen, yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa yang masing-masing mempunyai peranan penting dalam orientasi terhadap dunianya. Fungsi jiwa menurut

(Wirawan. 1993: 185) adalah suatu aktifitas kewajiban yang secara teori tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda. Sedangkan sikap jiwa merupakan arah dari pada energi psikis yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dirinya. Dengan demikian kesadaran menjadi bagian dari kejiwaan manusia, dan terkadang diartikan dengan hati nurani.

Beberapa tokoh yang telah berusaha merumuskan definisi kesadaran diantaranya sebagai berikut :

- 1) A.W Widjaya, apabila sadar dan kesadaran dikaitkan dengan konteks manusia dan masyarakat. Maka sadar (kesadaran) itu adalah kesadaran dirinya. Kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa misalnya tentang harga diri, kehendak (karsa) hukum dan lainnya. (1984; 14)
- 2) Prof. Dr. K Bertens, kesadaran dimaksudkan sebagai kesanggupan manusia untuk mengenal dirinya sendiri dan karena itu berrefleksi tentang dirinya (2001: 52).

M. Taopan dalam tulisannya yang berjudul kesadaran politik (2011) menyatakan bahwa kesadaran politik merupakan proses batin yang menampakan keinsyafan dari setiap warga negara akan pentingnya urusan kenegaraan dalam kehidupan bernegara. Kesadaran politik atau keinsyafan dari setiap warga negara akan pentingnya urusan kenegaraan dalam kehidupan bernegara. Kesadaran politik atau keinsyafan hidup bernegara menjadi penting dalam kehidupan kenegaraan, mengingat begitu kompleks dan beratnya tugas yang dipikul negara dalam hal ini para penyelenggara negara.

Kesadaran politik masyarakat tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan pemilihan umum. Akan tetapi diukur juga dari peran serta mereka dalam mengawasi atau mengoreksi kebijakan dan perilaku pemerintah selama memegang kekuasaan pemerintahan. Setiap masyarakat mempunyai kesadaran politik yang berbeda-beda. Kesadaran politik masyarakat sangat tergantung pada latar belakang pendidikannya.

Perlu diketahui bahwa kesadaran politik pada hakekatnya merupakan keinsyafan setiap individu atau masyarakat akan pentingnya nilai-nilai politisi. Nilai-nilai politik tersebut tidak diperoleh seseorang dengan sendirinya melainkan melalui proses sosialisasi politik yang didalamnya

terdapat proses pembelajaran mengenai semua hal tentang politik. Dengan kata lain kesadaran politik merupakan hasil dari sosialisasi politik yang dilakukan oleh agen-agen atau lembaga-lembaga sosialisasi politik. Dengan demikian sosialisasi politik mengandung makna “proses penyadaran seorang individu atau masyarakat untuk memiliki minat dan perhatian terhadap semua kegiatan politik yang berlangsung dalam suatu sistem politik yang berlangsung dilingkungannya yang ditujukan dengan berbagai partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan terutama dalam hal pengawasan dan pengoreksian berbagai kebijakan politik dari negaranya”.

Salah satu perkara penting yang harus ditumbuhkan dan diperkuat di tengah-tengah umat adalah kesadaran politik (*al-wa'yu as-siyasi*). Muhammad Ismail dalam kitabnya *Al-Fikr al-Islami* mendefinisikan kesadaran politik sebagai upaya manusia untuk memahami bagaimana memelihara urusannya. Kesadaran politik juga berarti *an-nadzrah ila'alam min zawiyat[in] khashshah* (pandangan yang universal/global dengan sudut pandang yang khas).

Karena itu, kesadaran politik tidak akan sempurna kecuali terpenuhi dua unsur : pertama, pandangan universal/global (*an-nadzrah ila'alam*). Sebagai contoh, kita tidak bisa melihat Obama sekedar dari sisi personalnya. Obama harus dilihat sebagai kepala negara Amerika. Amerika adalah negara pengemban utama ideologi kapitalisme yang menggunakan penjajahan sebagai metode untuk menyebarkan dan mempertahankan ideologinya.

Kita juga tidak boleh tertipu dengan tindakan Amerika di Indonesia yang terkesan menampilkan wajah ramah. Kita justru wajib melihat bagaimana kebijakan politik luar negeri Amerika secara menyeluruh di negeri-negeri Islam. Bagaimana Amerika menduduki Irak dan membunuh hampir satu juta Muslim di sana. Bagaimana Negara Paman Sam itu menjajah Afganistan. Obama bahkan mengirim 30 ribu pasukan tambahan di Afganistan. Ribuan kaum Muslim pun terbunuh tindakan keji Amerika.

Penting juga melihat bagaimana Amerika memecah-belah negeri-negeri Islam, seperti Sudan, termasuk di Indonesia dengan lepasnya Timor Timur. Bagaimana pula Amerika mendukung secara penuh dan membabi buta tindakan entitas Zionis Israel yang secara buas membunuh kaum

Muslim di Palestina secara sistematis dengan menggunakan peralatan canggih bantuan Amerika.

Kedua, sudut pandang yang khas (min zawiyat[in] khashshah. Dalam Islam, kesadaran politik bukanlah sebatas sadar akan situasi politik, posisi politik, atau peristiwa-peristiwa politik. Semua itu belum cukup jika belum didasarkan pada sudut pandang (ideologi) tertentu. Inilah yang akan mengarahkan sikap politik sebuah umat. Kesadaran politik ini akan bersifat permanen.

Kesadaran politik pada hakekatnya merupakan keinsyafan setiap individu atau masyarakat akan pentingnya nilai-nilai politik. Nilai-nilai politik tersebut tidak diperoleh seseorang dengan sendirinya melainkan melalui proses sosialisasi politik yang didalamnya terdapat proses pembelajaran mengenai semua hal tentang politik. Dengan kata lain kesadaran politik merupakan hasil dari sosialisasi politik yang dilakukan oleh agen-agen atau lembaga-lembaga sosialisasi politik. Dengan demikian sosialisasi kesadaran politik mengandung makna “proses penyadaran seseorang individu atau masyarakat untuk memiliki minat dan perhatian terhadap semua kegiatan politik yang berlangsung dilingkungannya yang ditujukan dengan berbagai partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan terutama dalam hal pengawasan dan pengoreksian berbagai kebijakan politik dari negaranya”.

#### **b. Indikator Kesadaran Politik**

Menurut Surbakti (2007: 144), kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga negara masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan (Budiardjo, 1985; 22) dalam Chandu (2012). Menurut Drs. M. Taophan, kesadaran politik adalah suatu proses batin yang menampakan keinsyafan dari setiap warga negara akan urgensi urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Soekanto (1982) terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, antara lain : pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku (tindakan). Pengetahuan adalah hasil dari proses mengingat suatu materi yang telah

dipelajari sebelumnya. Orang tahu harus bisa mendefinisikan materi atau objek tersebut. Pemahaman adalah hasil dari kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut dengan benar (Notoadmojo, 2003). Menurut Newcomb, sikap adalah kesediaan atau kesiapan untuk bertindak yang terdiri dari menerima, merespon, menghargai dan bertanggung jawab terhadap suatu objek. Sedangkan tindakan adalah sesuatu yang dilakukan atau perbuatan.

Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik (Eko, 2000: 14) dalam Chandu (2012). Kesadaran politik atau keinsyafan bernegara menjadi penting dalam kehidupan kenegaraan, mengingat tugas-tugas negara bersifat menyeluruh dan kompleks. Karena itu tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat akan banyak tugas negara yang terbengkalai (Idshvoong, 2011).

Jeffry M. Paige dalam Surbakti (2007: 144) menyebutkan aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya.

### c. **Alat Ukur Kesadaran Politik**

Beberapa ungkapan Ramlan Surbakti berikut dapat dijadikan sebagai kategori dari partisipasi politik :

- 1) Kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi politik.
- 2) Kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Termasuk kedalam pengertian ini seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksana keputusan politik, dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah.
- 3) Kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah.

- 4) Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Kesadaran akan partisipasi politik rakyat ataupun alasannya adalah merupakan suatu *conditio sine qua non* (prasarat utama) yang harus dipenuhi dalam membangun negara bangsa yang demokratis.

Untuk mencapai kesadaran dan partisipasi politik masyarakat di daerah yang tinggi maka hal yang penting dilakukan adalah pendidikan politik yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Contohnya : masyarakat akan merasakan proses pembelajaran politik melalui aktivitas politik seperti PILKADA langsung. Idealnya Pilkada langsung yang telah dilakukan pada daerah-daerah di Indonesia haruslah merupakan sebagai proses edukasi politik secara langsung yang diharapkan akan berdampak secara positif terhadap masyarakat. Namun proses Pilkada yang telah berlangsung cenderung rentan akan gejolak dan kekerasan serta praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai demokratis. Kejadian ini bukanlah sebuah contoh pembelajaran yang baik dan tidak patut untuk di contoh.

#### **Hasil Pemilu Legislatif 9 April 2014 (Final Oleh KPU)**

Nama Partai	Presentase
SUARA	
1. Partai Nasdem	6,72%
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	9,04%
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	6,79%
4. PDI Perjuangan (PDIP)	18,95%
5. Partai Golkar	14,75%
6. Partai Gerindra	11,81
7. Partai Demokrat	10,19%
8. Partai Amanat Nasional	7,59%
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6,53%
10. Partai Hanura	5,26%
11. Partai Damai Aceh	0%

12. Partai Nasional Aceh	0%
13. Partai Aceh	0%
14. Partai Bulan Bintang	1,46%
15. PKP Indonesia (PKPI)	0,91%
TOTAL DATA MASUK :	

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (disingkat Pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pilihan Presiden langsung ketiga di Indonesia. Presiden pertahanan Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang Presiden. Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat digugat di Mahkamah Konstitusi, namun pada bulan Januari 2014, mahkamah memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku. Pemilihan umum ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan memperoleh suara terbesar 46,85% sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014. Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.

Proses Pilkada langsung yang belum tercapai seperti harapan tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran partisipasi politik masyarakat rendah. Mengapa demikian? Karena kesadaran kritis belum dimiliki oleh rakyat pemilih, para pendukung konsetan dan para calon. Bagi sebagian orang tersebut maka Pilkada adalah ajang untuk meraih keuntungan. Padahal demokrasi yang utuh tidak akan dapat terwujud tanpa didukung oleh kesadaran kritis masyarakat.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat di daerah adalah perlu ditingkatkannya kualitas sumber daya manusia baik yang ada pada infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Karena jujur kita katakan bahwa saat ini kualitas SDM pada dua kelompok ini di kebanyakan Daerah masih rendah.

Kesadaran kritis rakyat akan partisipasi politiknya harus tetap dibangun, melalui berbagai kegiatan sosialisasi kebijakan politik, pendidikan politik dan komunikasi politik yang dilakukan secara transparan. Hal ini dalam jangka pendek untuk proses Pilkada langsung akan berdampak pada tidak terjadinya sikap pragmatisme dalam menentukan pilihan.

Namun hal yang perlu disiapkan tatkala ledakan partisipasi masyarakat semakin meningkat maka perlu diimbangi dengan kekuatan institusi sebagai wadah bagi aktivitas masyarakat. Dalam hal ini perlu adanya pelembagaan partisipasi masyarakat agar tidak terjadi aktivitas politik masyarakat yang justru mengacaukan proses berdemokrasi. Pelembagaan partisipasi politik dapat dilakukan melalui dua bentuk : pertama, pelembagaan secara formal yaitu pelembagaan dengan mengacu pada prosedur dan aturan main yang telah ditetapkan dengan UU seperti kepersertaan dalam partai, keikutsertaan dalam pemilu, keterlibatan pengambilan kebijakan publik, ekspresi unjuk rasa dll. Kedua, pelembagaan partisipasi masyarakat secara substansial, yaitu pelembagaan yang lebih berorientasi pada nilai, kesadaran, dan sikap volunteri dari individu untuk terlibat dan peduli pada problem sosial dan masalah sosial ekonomi dan politik lainnya.

#### **d. Pentingnya kesadaran Politik**

Salah satu perkara penting yang harus ditumbuhkan dan diperkuat ditengah-tengah umat adalah kesadaran politik. Muhammad Ismail dalam kitabnya *All-Fikr all-Islami* mendefinisikan kesadaran politik sebagai upaya manusia untuk memahami bagaimana memelihara urusannya. Karena itu kesadaran politik tidak akan sempurna kecuali dipenuhinya dua unsur diatas. Pertama, pandangan universal dalam hal ini seseorang melihat sebuah masalah bukan secara regional, yang dibatasi pada negeri-negeri tertentu saja, namun melihatnya secara menyeluruh (global). Dengan kacamata universal dengan sudut pandang yang khas ini sikap politik kita menjadi jelas.

Kesadaran politik umat berdasarkan Islam akan membangun umat dengan karakteristik yang istimewa dan khas. Berupa pandangan universal terhadap kemashlatan manusia yang ditinjau dari sudut pandang Islam. Berdasarkan hal ini umat Islam wajib meyakini bahwa hanya Islam yang bisa menyelamatkan seluruh dunia ini. Tidak berhenti sekedar paham, kesadaran politik mendorong umat Islam untuk terjun dalam perjuangan mewujudkan Islam dalam

kehidupan yang nyata. Berjuang dengan penuh keikhlasan dan sikap dengan segala bentuk pengorbanan, setinggi apapun cita-cita yang mulia tidak akan pernah terwujud.

Dengan adanya kesadaran politik setiap individu dapat terjun ke dalam masyarakat dengan baik, agar memilih pimpinan yang baik sesuai dengan kriteria masyarakat bangsa dan negara. Kesadaran politik akan tercipta dengan adanya sosialisasi politik. Kesadaran politik akan sangat bergantung kepada latar belakang pendidikannya. Masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi cenderung mempunyai kesadaran politik yang relatif tinggi. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, maka kesadaran politiknya relatif rendah sehingga menentukan pembinaan.

**e. Kesadaran Politik Mahasiswa**

Salah satu penyakit mahasiswa adalah apatisme. Tidak jarang mahasiswa baru yang tidak siap menerima dan terjun pada dunia kampus. Bahkan sebagian dari mahasiswa baru keteteran, sehingga menimbulkan rasa acuh terhadap berbagai hal yang membutuhkan perhatian mereka.

Penyakit apatisme sudah merajalela dengan beberapa pembuktian nyata yang sederhana. Dapat kita lihat dalam kehidupan dunia kampus, mahasiswa kupu-kupu (kuliah pulang, kuliah pulang) semakin berkembang dengan jumlah yang cukup banyak. Mereka tidak inisiatif untuk aktif dan terjun langsung menangani berbagai masalah yang ada. Rasa empati dan simpati mulai memudar karena tidak adanya kepekaan dan perasaan. Seperti yang terjadi dikampus khususnya Universitas Pasundan Bandung.

Misalnya banyak mahasiswa yang tidak berperan aktif dalam organisasi mahasiswa, mahasiswa apatis terhadap kondisi politik, banyak mahasiswa yang hanya bicara tanpa melakukan tindakan (*no action talk only*) dan tidak mampu memberi solusi apabila terjadi permasalahan di kampus atau di masyarakat.

Kesadaran politik mahasiswa kini mulai memudar, hal ini dikarnakan terjadi akibat kultur modernisasi dan globalisasi yang cenderung mengikis idealisme mahasiswa atau para pelajar umumnya. Padahal realita dalam bentangan negeri ini mahasiswa memiliki peran besar sebagai agen perubahan, karena itu kesadaran politik mahasiswa perlu ditingkatkan, mahasiswa bukan hanya kuliah, dapat nilai IP besar tetapi harus merakyat dan peduli terhadap

kepentingan rakyat. Melihat dari sejarah, ujung tombak perubahan khususnya pada dunia politik selalu dilakukan oleh mahasiswa, sebab mahasiswa itu bukan hanya berfungsi sebagai intelektual sosialis.

### **3. Organisasi Kemahasiswaan**

#### **a. Pengertian dan Kedudukan Organisasi Kemahasiswaan**

Organisasi mahasiswa adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa untuk mewadahi bakat, minat dan potensi mahasiswa yang dilaksanakan didalam kegiatan ko dan ekstrakurikuler.

Organisasi ini dapat berupa organisasi kemahasiswaan intra kampus. Organisasi kemahasiswaan antar kampus, organisasi ekstra kampus, maupun semacam ikatan mahasiswa kedaerahan yang pada umumnya beranggotakan lintas atau antar kampus. Salah satu bentuk organisasi mahasiswa adalah Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis (IOMS) baik ditingkat perguruan tinggi, antar perguruan tinggi, maupun tingkat nasional sebagai wadah kerja sama dan berjejaring untuk mengembangkan potensi serta partisipasi aktif terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kemajuan Indonesia sesuai disiplin ilmunya. Kedudukan IOMS berada di fakultas, Jurusan atau Program Studi. IOMS adalah suatu forum kemahasiswaan tingkat nasional yang menghubungkan secara koordinatif antar organisasi-organisasi kemahasiswaan yang sama jenisnya. IOMS adalah singkatan dari Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis. Setiap IOMS hendaknya terdaftar secara resmi di Dikti, karena ada dana kemahasiswaan untuk IOMS dari Dikti. IOMS bukan merupakan organisasi baru ditingkat nasional, melainkan sebuah deklarasi ikatan organisasi-organisasi sejenis yang sudah ada. Misalnya BEM FK diseluruh universitas di Indonesia membentuk ISMKI, atau BEM FAPET se-Indonesia membentuk ISMAPETI, dan lain-lain. Jadi IOMS akan mengkoordinir kegiatan mahasiswa yang setingkat nasional dan semua kegiatan eksekutif dihandle oleh lembaga yang ada di fakultas atau universitas.

Bentuk berikutnya adalah Unit Kegiatan Mahasiswa yang biasanya disingkat UKM yaitu organisasi mahasiswa yang dibentuk berdasarkan kesamaan minat, baik dibidang olahraga, seni atau lainnya serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang bentuk dan atau strukturnya berbeda di setiap perguruan tinggi. Kedudukan UKM karena beranggotakan berbagai

disiplin ilmu, maka kedudukannya ada di Universitas/Rektorat, demikian juga BEM.

Beberapa IOMS tingkat nasional memiliki legalitas berupa SK dari Dirjen DIKTI (tidak ada keharusan) dan hanya ada satu IOMS yang mewakili setiap organisasi/ikatan/himpunan disetiap disiplin ilmu ditingkat nasional. Mahasiswa Indonesia di luar negeri juga membentuk organisasi mahasiswa berupa Perhimpunan Pelajar Indonesia, atau PPI yang beranggotakan pelajar dan mahasiswa Indonesia ara mandiri, dari pengelola perguruan tinggi dan atau dari Kementrian/Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah untuk memajukan program kerja serta kemajuan lainnya. Bentuknya dapat berupa Ikatan Organisasi Mahasiswa, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Senat Mahasiswa tingkat fakultas dan Himpunan Mahasiswa jurusan (HNJ), dan para Ketua Tingkat. Kewenangan pengaturan sepenuhnya ada ditangan pemimpin perguruan tinggi yang dituangkan dalam Statuta (UU No.12 Tahun 2012). Organisasi Kemahasiswaan ekstra kampus pada suatu perguruan tinggi dapat bergabung dalam skala daerah, nasional bahkan internasional. Gabungan organisasi ekstra kampus beberapa perguruan tinggi ini disebut organisasi antar kampus. Para aktivis organisasi mahasiswa eksternal kampus pada umumnya juga berasal dari kader-kader organisasi ekstra kampus seperti: HMI, GMKI, GMNI, PMKRI, PMI, atau sejenisnya yang bernaung dibawah KNPI, ataupun aktivis-aktivis independen yang berasal dari berbagai kelompok studi atau kelompok kegiatan lainnya. Saat pemilu mahasiswa dituntut untuk memilih ketua BEM, ketua senat mahasiswa yang akan bertarung antar organisasi-organisasi ekstra kampus sangat terasa. Dan dipimpin oleh komisi pemilihan umum mahasiswa sebagai pelaksana pemilihan ditingkat rektorat atau kampus dan juga ditingkat fakultas masing-masing.

Organisasi kemahasiswaan intra kampus adalah organisasi mahasiswa yang melekat pada pribadi kampus atau universitas, dan memiliki kedudukan resmi di lingkungan perguruan tinggi. Organisasi ini mendapat pendanaan kegiatan kemahasiswaan.

Pada dasarnya, Organisasi Mahasiswa adalah sebuah wadah berkumpulnya mahasiswa demi mencapai tujuan bersama, namun harus tetap sesuai koridor AD/ART yang disetujui oleh semua anggota dan pengurus

organisasi tersebut. Organisasi Mahasiswa tidak boleh keluar dari rambu-rambu utama tugas dan fungsi perguruan tinggi yaitu tri darma perguruan tinggi tanpa kehilangan daya kritis dan tetap berjuang atas nama mahasiswa, bukan pribadi atau golongan.

#### **b. Peran dan Fungsi Organisasi Kemahasiswaan**

Mahasiswa saat ini merupakan harapan terbesar bagi masyarakat sebagai penyambung lidah rakyat terutama sebagai perubahan di masyarakat (*Agen social of change*). Sebagai salah satu potensi, mahasiswa sebagai bagian dari kaum muda dalam tatanan masyarakat yang mau tidak mau pasti terlibat langsung dalam tiap fenomena social, harus mampu mengimplementasikan kemampuan keilmuannya dalam akselerasi perubahan keumatan ke arah berkeadaban.

Keterlibatan mahasiswa dalam setiap perubahan tatanan kenegaraan selama ini sudah menjadi jargon dan pilar utama terjaminnya sebuah tatanan kenegaraan yang demokratis. Romantisme politis antara mahasiswa dengan rakyat terlihat fungsinya sebagai *social control* termasuk terhadap kebijakan menindas.

Mahasiswa dalam hal ini sudah menunjukkan jati diri sebagai salah satu potensi yang dapat diandalkan dalam upaya menuju tatanan masyarakat yang berkeadilan. Dan distribusinya baik secara kualitas maupun kuantitas dalam segala aspek kehidupan sosial adalah semestinya diperhitungkan.

Bentuk keberhasilan dalam mewujudkan sebuah tatanan masyarakat berkeadaban di Indonesia adalah dengan semakin kecilnya angka kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, peningkatan taraf ekonomi dan pendidikan, dan lain sebagainya. Namun itu semua hanya akan menjadi mimpi belaka manakala semua konsep-konsep yang dibangun dan berbasis kerakyatan tersebut tidak dibarengi dengan strategi yang matang dan jitu ke arah tujuan tersebut. Dan maksimalisasi fungsi mahasiswa dan kaum muda dalam tiap laju demokratisasi merupakan salah satu pilar yang perlu diperhatikan.

Peran mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sosial ditunggu. Diharapkan mahasiswa mampu memainkan peran yang strategis. Kesatuan visi, tekad, dan perjuangan untuk kepentingan masyarakat luas menjadi pondasi utama peran tersebut saat ini atau nanti. Namun, untuk mewujudkan

hal tersebut sekali lagi, perlu pemetaan, perumusan, dan penelaahan metode penerapan fungsi mahasiswa dalam kancah epistemology keumatan tersebut.

### c. Organisasi Kemahasiswaan Ekstra Kampus

Organisasi ekstra kampus merupakan organisasi mahasiswa yang aktivitasnya berada diluar lingkup universitas atau perguruan tinggi. Organisasi ekstra kampus biasanya berafiliasi dengan partai politik tertentu walaupun tidak secara eksplisit. Organisasi mahasiswa ekstra antara lain:

#### 1) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)\

Gerakan Mahasiswa Nasional adalah sebuah organisasi mahasiswa di Indonesia. Organisasi ini adalah sebuah gerakan mahasiswa yang berlandaskan ajaran Marhaenisme. Marhaenisme diambil dari kata marhaen yang berarti orang yang tertindas, sedangkan marhaenis adalah orang-orang yang memperjuangkan hak-hak orang yang tertindas, sedangkan marhaenisme sendiri adalah ideology paham tentang marhaen tersebut. GMNI dibentuk tanggal 22 Maret 1954 sebagai hasil gabungan dari tiga organisasi mahasiswa, masing-masing Gerakan Mahasiswa Marhenis, gerakan mahasiswa merdeka, dan Gerakan mahasiswa demokrat Indonesia.

#### 2) Himpunan mahasiswa Islam adalah sebuah organisasi yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 5 Febuari 1947, atas prakarsa Lafran Pane beserta 14 mahasiswa Sekolah Tinggi Islam Yogyakarta.

#### 3) Himpunan mahasiswa Buddhis Indonesia disingkat HIKMAHBUDHI adalah organisasi mahasiswa Buddhis nasional di Indonesia. Berawal dari sebuah majalah bernama Hikmahbudhi yang digerakan oleh mahasiswa Buddhis di Djakarta era 70-an. Pemilihan nama majalah menyiaratkan visi mahasiswa Buddhis pada masa itu, untuk membentuk suatu wadah nasional bagi mahasiswa Buddhis suatu saat kelak. Penulisan majalah sengaja tidak menggunakan huruf besar secara keseluruhan sebagaimana cara penulisan organisasi. Majalah Hikmahbudhi yang terbit sejak 16 Mei 1971 tersebut, merupakan majalah Buddhis tertua yang masih eksis hingga hari ini di Indonesia. Usaha membentuk organisasi akhirnya baru terwujud pada tahun 1988, dimana diadakan pertemuan antar mahasiswa Buddhis dari 13 kota dan bersepakat untuk membentuk HIKMAHBUDHI.

#### 4) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 1964, bertetapan dengan tanggal 29 Syawal 1384 H. Dibandingkan

dengan organisasi otonom lainnya seperti Nasyiatul'Aisyiyah (NA) didirikan pada tanggal 16 Mei 1931 (28 Dzulhijjah 1349 H); Pemuda Muhammadiyah dibentuk pada tanggal 2 Mei 1932 (25 Dzulhijjah 1350 H); dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM, yang namanya diganti menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) didirikan pada tanggal 18 juli 1961 (5 Shafar 1381 H).

- 5) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) adalah sebuah organisasi mahasiswa muslim yang lahir di era reformasi yaitu tepatnya tanggal 29 Maret 1998 di Malang. Anggotanya tersebar di hamper seluruh PTN/PTS di Indonesia. Saat ini, kader KAMMI sudah mampu menjadi pemimpin kampus (Ketua BEM) hamper di 300 kampus. Selain itu, memiliki cabang juga di Jepang.
- 6) Lembaga Dakwah Kampus (LDK) adalah sebuah organisasi kemahasiswaan intra kampus yang terdapat di tiap-tiap perguruan tinggi di Indonesia. Organisasi ini bergerak dengan Islam sebagai dasarnya. Sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia pasti mempunyai LDK. Tiap-tiap perguruan tinggi, nama LDK bisa berbeda-beda. Kadang mereka menyebut dirinya sebagai Sie Kerohanian Islam, Forum Studi Islam, Lembaga Dakwah Kampus, Badan Kerohanian Islam, dan sebagainya.
- 7) Pelajar Islam Indonesia (PII) didirikan di kota perjuangan Yogyakarta pada tanggal 4 Mei 1947. Pada pendirinya adalah Yoesdi Ghozali, Anton Timur Djaelani, Amien Syahri dan Ibrahim Zarkasji. Salah satu factor pendorong terbentuknya PII adalah dualism system pendidikan di kalangan umat Islam Indonesia yang merupakan warisan kolonialisme Belanda, yakni pondok pesantren dan sekolah umum.
- 8) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan salah satu elemen mahasiswa yang terus bercita-cita mewujudkan Indonesia ke depan menjadi lebih baik. PMII berdiri tanggal 17 April 1960 dengan latar belakang situasi politik tahun 1960-an yang mengharuskan mahasiswa turut andil dalam mewarnai kehidupan sosial politik di Indonesia. Pendirian PMII dimotori oleh kalangan muda NU (meskipun di kemudian hari dengan dicituskannya Deklarasi Murnajati 14 Juli 1972, PMII menyatakan sikap independen dari lembaga NU). Diantara pendirinya adalah Mahbub Djunaidi dan Subhan ZE (seorang jurnalis sekaligus politikus legendaris).
- 9) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) merupakan Organisasi Kepemudaan (OKP) katolik yang berfungsi sebagai organisasi

pembinaan dan organisasi perjuangan mahasiswa katolik (juga bukan katolik) yang berazaskan Pancasila, dijiwai kekatolikan, dan disemangati kemahasiswaan. Ditetapkan berdiri pada 25 Mei 1947. Namun demikian cikal bakal organisasi ini telah lahir jauh sebelumnya yakni saat berdirinya KSV Sanctus Bellarminus Batavia (didirikan di Jakarta, 10 November 1928), KSV Sanctus Thomas Aquinas Bandung (didirikan di Bandung, 14 Desember 1947), dan KSV Sanctus Lucas Surabaya (didirikan di Surabaya, 12 Desember 1948).

#### **d. Peran Organisasi Kemahasiswaan Ekstra Kampus**

Organisasi ekstra kampus memiliki banyak sekali kelebihan dibanding organisasi intra kampus. Diantara sekian banyak yang menjadi kelebihannya, salah satunya adalah kekuatan jaringannya. Wilayah cakupannya yang luas (nasional), membuat organisasi ekstra kampus memiliki ruang yang luas pula untuk mengepakkan sayapnya dan bergerak sesuai dengan misi yang mereka impikan. Karena tiap kader dari organisasi ini mempunyai misi yang sama, maka atas dasar ini pulalah kader-kadernya merasa memiliki peran yang sama sehingga mampu membuat mereka saling terikat satu sama lain. Keterikatan itulah yang kemudian membuat sebuah hubungan antara kader dari daerah tertentu dengan kader di daerah lainnya secara inten yang kemudian membuat mereka merasa saling menjaga satu sama lainnya.

Mahasiswa yang aktif berorganisasi secara konsisten semata-mata memiliki pemahaman bahwa organisasi kemahasiswaan merupakan sebuah sarana yang efektif dalam mengkader dirinya sendiri untuk ke depan. Sebagaimana diantaranya masih mempunyai keyakinan pandangan bahwa kampus merupakan tempat menimba ilmu yang tidak terbatas hanya kepada pelajaran semata. Dengan bergabung aktif dalam organisasi kemahasiswaan yang bersifat intra maupun ekstra kampus berefek kepada perubahan yang signifikan terhadap wawasan, cara berfikir, pengetahuan dan ilmu-ilmu sosialisasi, kepemimpinan serta manajemen kepemimpinan yang notabene tidak diajarkan dalam kurikulum normative perguruan tinggi. Namun, dalam berorganisasi lah dapat diraih dengan memanfaatkan statusnya sebagai mahasiswa.

Pemahaman arti penting sebuah organisasi dan aktivitas organisasi mahasiswa adalah salah satu persoalan yang pertama-tama harus diluruskan.

Adanya anggapan bahwa berorganisasi berarti berdemonstrasi, atau berorganisasi khususnya di kampus tidak lebih dari sekedar membuang sebagian waktu, energi, ajang mencari kawan merupakan bukti adanya kesalahan pemahaman tentang persepsi sebagian mahasiswa tentang organisasinya sendiri.

**e. Peran Organisasi Kemahasiswaan Ekstra Kampus Dalam Kehidupan Politik**

Organisasi kemahasiswaan (ormawa) ekstra kampus merupakan wadah pengembangan diri mahasiswa. Ormawa ekstra kampus mempunyai fungsi dan peran sebagaimana konsep pendidikan nonformal, yaitu sebagai pelengkap, penambah dan pengganti pendidikan formal. Di era kini eksistensi ormawa ekstra kampus tidak diperhitungkan, bahkan dinilai meresahkan oleh kalangan mahasiswa sendiri. Padahal dengan adanya ormawa ekstra kampus ini mahasiswa bias belajar dan memahami bagaimana hakikat mahasiswa yang sebenarnya.

Organisasi ekstra kampus memiliki banyak sekali kelebihan dibanding organisasi intra kampus. Diantara sekian banyak yang menjadi kelebihannya, salah satunya adalah kekuatan jaringannya. Wilayah cakupannya yang luas (nasional), membuat organisasi mahasiswa ekstra kampus memiliki ruang yang luas pula untuk mengepaskan sayapnya dan bergerak sesuai dengan misi yang mereka impikan. Karena tiap kader dari organisasi ini mempunyai misi yang sama, maka atas dasar ini pulalah kader-kadernya merasa memiliki peran yang sama sehingga mampu membuat mereka saling terikat satu sama lain. Keterikatan itulah yang kemudian membuat sebuah hubungan antara kader dari daerah tertentu dengan kader di daerah lainnya secara inten yang kemudian membuat mereka merasa saling menjaga satu sama lainnya.

Kedudukan organisasi kampus biasanya selalu dipandang negatif di kampus. Dari sekian banyak kampus yang pernah kami kunjungi, keberadaan mereka selalu tersudutkan. Meskipun demikian, nampaknya peran mereka di kampus tidak seperti apa yang mahasiswa umum pandang. Bahkan sebagean besar pejabat organisasi intra kampus itu sebenarnya adalah para kader dari organisasi ekstra kampus. Dan keberadaan kader-kader ekstra yang mengawal dan mengatur arah pergerakan mahasiswa intra tersebut, nampaknya tidak akan pernah mampu membuat organisasi tersebut dipandang positif. Karena

memang mindset yang berkembang di kalangan mahasiswa, adalah bahwa “organisasi ekstra kampus merupakan sebuah wadah masuknya partai politik ke kampus”. Memang praduga mereka ini benar untuk sebagian organisasi ekstra kampus. Namun nampaknya tidak dapat digunakan sebagai representasi dari semua organisasi kampus. Karena hanya sebagian kecil organisasi ekstra kampus yang memang dikendalikan oleh partai atau golongan tertentu. Sebagian besar organisasi kampus malah justru banyak yang independen dan tidak ada sangkut pautnya dengan partai atau golongan manapun. Meskipun alumni mereka banyak yang aktif di partai politik.

Banyaknya kader ekstra kampus yang memegang jabatan penting di kampus nampaknya tak lepas dari pola kaderisasi yang ditetapkan di organisasi ekstra. Pola kaderisasi yang ada di organisasi ekstra memang terkadang agak terkesan tidak jelas. Semua proses kaderisasi didasarkan atas asas kekeluargaan dan tidak terikat pada momen atau kegiatan tertentu saja. Bahkan waktu kaderisasinyapun sepanjang tahun (kontinu). Hal ini tentu membuat sebagian besar kader dari organisasi intra yang proses kaderisasinya hanya terbatas pada momen-momen tertentu saja. Memang, pengembangan wawasan itulah yang menjadi titik kunci dari keberhasilan organisasi ekstra kampus dalam mendidik kader-kadernya. Adapun wawasan yang biasanya jauh lebih ditekankan pada proses kaderisasi di ekstra adalah wawasan yang mampu membangun dan menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap Indonesia.

Rasa nasionalisme yang tinggi inilah yang biasanya dimiliki oleh sebagian besar kader organisasi ekstra kampus. Pasalnya, di organisasi inilah sebenarnya kebanggaan, kecintaan, dan rasa memiliki di tumbuhkan lewat kajian-kajian sederhana tentang ke Indonesiaan. Dari diskusi sederhana itulah semua wawasan tentang ke Indonesiaan didoktrinnya hingga kader-kadernya mampu benar-benar menjiwai rasa nasionalisme mereka. Hal ini sebenarnya mampu mengisi kekurangan yang dimiliki oleh kampus, yaitu kurangnya pendidikan tentang ini sangatlah dibutuhkan oleh seorang mahasiswa untuk melengkapi ilmu yang mereka pelajari di kampus.

## **f. Organisasi HMI**

### **1) Sejarah HMI**

Sebelum lahirnya Himpunan Mahasiswa Islam, terlebih dulu berdiri organisasi kemahasiswaan bernama Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta

(PMY) pada tahun 1946 yang beranggotakan mahasiswa dari tiga Perguruan Tinggi di Yogyakarta, yaitu Sekolah Tinggi Teknik (STT), Sekolah Tinggi Islam (STI) dan Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada yang pada waktu itu hanya memiliki Fakultas Hukum dan Fakultas Sastra.

Oleh karena Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta dirasa tidak memperhatikan kepentingan para mahasiswa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam. Tidak tersalurnya aspirasi keagamaan merupakan alasan kuat bagi para mahasiswa Islam untuk mendirikan organisasi kemahasiswaan yang berdiri dan terpisah dari Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta.

Pada tahun 1946, suasana politik di Indonesia khususnya di Ibu Kota Yogyakarta mengalami polarisasi antara pihak pemerintah yang dipelopori oleh partai sosialis, pimpinan Syahrir-Amir Syarifuddin dan pihak oposisi yang dipelopori oleh Masyumi, pimpinan Soekiman-wali Al-Fatah dan PNI, pimpinan Mangunsarkoro-Suyono Hadinoto serta persatuan pernyangannya Tan Malaka. Polarisasi ini bermula pada dua pendirian yang saling bertolak belakang, pihak partai sosialis (Pemerintah) menitikberatkan perjuangan memperoleh pengakuan Indonesia kepada perjuangan dberdiplomasi, pihak oposisi pada perjuangan bersenjata melawan Belanda.

Polarisasi ini membawa mahasiswa yang juga sebagian besar dari mereka adalah pengurus Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta berorientasi kepada partai Sosialis. Melalui mereka inilah partai Sosialis mencoba mendominasi Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta. Namun mahasiswa yang masih memiliki idealisme tidak dapat membiarkan usaha partai Sosialis hendak mendominasi Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta. Dengan suasana yang sangat kritis dikarenakan Belanda semakin memperkuat diri dengan terus-menerus mendatangkan bala bantuan persenjataan modern yang kemudian pada tanggal 21 Juli 1947 terjadilah yang dinamakan Agresi Militer Belanda I. Dengan situasi yang demikian para mahasiswa yang berideologi murni tetap bersatu menghadapi Belanda, mencegah setidaknya-tidaknya mengurangi efek-efek dari polarisasi politik yang sangat melemahkan potensi Indonesia menghadapi Belanda. Karenanya mereka menolak keras akan sikap dominasi partai Sosialis

terhadap mahasiswa yang dinilai akan mengakibatkan dunia mahasiswa terlihat dalam polarasi politik.

Berbagai hal ini mendorong beberapa orang mahasiswa untuk mendirikan organisasi baru. Meskipun sebenarnya jauh sebelum adanya keinginan untuk mendirikan organisasi baru sudah ada cita-cita akan itu, namun selalu ditunda dan dianggap belum tepat. Namun melihat dari berbagai kondisi yang ada dirasa cita-cita yang sudah lama diharapkan itu perlu diwujudkan karena bila membiarkan Persyerikatan Mahasiswa Yogyakarta lebih lama didominasi oleh partai Sosialis adalah hal yang tidak tepat. Penolakan sikap dominasi partai Sosialis terhadap Persyerikatan Mahasiswa Yogyakarta tidak hanya datang dari kalangan mahasiswa islam, melainkan juga mahasiswa kristen, mahasiswa katolik, serta berbagai mahasiswa yang masih menjunjung teguh ideologi keagamaan.

Awal berdirinya HMI, HMI di prakarsai oleh Lafran Pane, seorang mahasiswa tingkat I (semester I) Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Islam (sekarang Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH-UII)). Ia mengadakan pembicaraan dengan teman-temannya mengenai gagasan membentuk organisasi mahasiswa bernaifaskan Islam dan setelah mendapatkan cukup banyak dukungan, pada bulan November 1946, ia mengundang para mahasiswa Islam yang berada di yogyakarta baik di Sekolah Tinggi Islam, Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada dan Sekolah Teknik Tinggi, untuk menghadiri rapat, guna membicarakan maksud tersebut. Rapat-rapat ini dihadiri kurang lebih 30 orang mahasiswa Yogyakarta dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Rapat-rapat yang digelar tidak menghasilkan kesepakatan. Namun Lafran Pane mengambil jalan keluar dengan mengadakan rapat tanpa undangan, yaitu dengan mengadakan pertemuan mendadak yang mempergunakan jam kuliah Tafsir oleh Husein Yahya. Pada tanggal 5 Februari 1947 (bertepatan dengan 14 Rabiulawal 1366 H), di salah satu ruangan kuliah Sekolah Tinggi Islam di Jalan Setyodiningratan 30 (sekarang jalan senopati) Yogyakarta, masuklah Lafran Pane yang berlangsung berdiri di depan kelas dan memimpin rapat yang dalam prakatanya mengatakan : “Hari ini

adalah rapat pembentukan organisasi Mahasiswa Islam, karena semua persiapan yang diperlukan sudah beres”.

**a) Subangansih Perjuangan HMI atau KIPK**

Harian kedaulatan rakyat tertanggal 28 Februari 1947 memuat sebuah berita demikian :

“Baru-baru ini Yogyakarta, telah didirikan Himpunan Mahasiswa Islam. Anggota-anggotanya terdiri dari mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia yang beragama Islam. Perhimpunan akan menjadi anggota kongres mahasiswa Indonesia”. Sekretariat : Asrama Mahasiswa, Setyodiningratan 5 Yogyakarta. Hanya ini pemberian yang kita dapati dari pers, sehubungan dengan berdirinya HMI.”

Rabu Pon, 14 Rabiulawal 1366 H atau bertepatan dengan 5 Februari 1947 M pukul 16.00 WIB, lahir sebuah organisasi mahasiswa yang kelak menjadi wadah perkaderan bagi calon-calon pemimpin bangsa. Di tengah pergolakan nasional mempertahankan kemerdekaan dan polarasi kaum terpelajar ke dalam paham sosialisme, HMI muncul sebagai organisasi mahasiswa pertama yang memakai label Islam. HMI adalah singkatan dari Himpunan Mahasiswa Islam yang ide pertamanya dikemukakan oleh Lafran Pane.

Bertempat di salah satu ruang kuliah Sekolah Tinggi Islam/STI (sekarang UII), Jl. Setyodiningratan 30 (sekarang P. Senopati 30), Lafran Pane sebagai penggagas HMI memanfaatkan jam kuliah tafsir Al-qur'an yang diasuh oleh Prof. Husein Yahya untuk mendeklarasikan pembentukan HMI. Dengan berdiri tegak di hadapan kelas yang dihadiri oleh lebih kurang 20 mahasiswa, ia membacakan prakata sebagai berikut : “Hari ini adalah rapat pembentukan organisasi mahasiswa Islam, karena seluruh persiapan maupun perlengkapan sudah siap...”.

Acara deklarasi tersebut selesai seiring dengan terbenamnya matahari dari ufuk barat. Sejak itu HMI secara resmi berdiri dengan beberapa tokoh pendiri antara lain : Lafran Pane, Kartono, Dahlan, Anton Timur Djaelani, Yusdi Ghazali dan lain-lain.

Berbicara mengenai berdirinya HMI, maka kita tidak akan lepas dari sosok yang paling berperan yaitu Lafran Pane. Lafran Pane dilahirkan di Tapanuli Selatan pada tahun 1925. Beliau adalah satu keluarga dengan Sanusi Pane dan Armyn Pane (penyair angkatan pujangga baru). Masa mudanya dipenuhi dengan petualangan dan pergulatan pemikiran yang amat keras, sehingga Lafran Pane muda dikenal dengan tingkah lakunya yang aneh dan ide-idenya sangat cerdas namun seringkali tidak sistematis. Pendidikan agamanya diawali di lingkungan Islam tradisional Sumatera. Metode pembelajaran agama dengan pengenalan sifat dua puluh (konsep ini sama dengan model pembelajaran agama yang ditetapkan oleh NU di Jawa) dikecap Lafran Pane waktu kecil. Setelah menginjak dewasa, Lafran Pane kemudian melanjutkan pendidikan formalnya di sekolah-sekolah modern milik Muhammadiyah (Sitompul 1976).

Semenjak berdirinya, HMI merupakan organisasi independen yang berbasis mahasiswa dengan mengutamakan kebebasan berfikir dan bertindak sesuai dengan hati nurani. Komitmen pada perjuangan Islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan idealisme yang selalu dipegang teguh oleh para kader HMI, hal ini sebagaimana tercantum dalam tujuan awal pembentukan HMI :

- (1) Mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat Indonesia.
- (2) Menegakan dan mengembangkan Agama Islam.

**b) Tokoh-tokoh HMI Di Panggung Politik**

- (1) Jusuf Kalla. Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah salah satu alumni HMI yang sukses di dunia perpolitikan Indonesia. Mantan ketua HMI Makassar ini sudah pernah menjabat berbagai jabatan tinggi seperti menteri hingga dua kali jadi Wakil Presiden.
- (2) Akbar Tandjung. Politisi senior ini pernah menjadi ketua PB HMI periode 1971-1974 saat masih kuliah di Universitas

Indonesia. Dirinya juga beberapa kali menjabat sebagai menteri di era Kepemimpinan Presiden Suharto.

- (3) Abdullah Hehamahua. Mantan ketua komite Etik KPK yang punya penampilan khas ini pernah menjadi ketua PB HMI tahun 1978-1981.
- (4) Mahfud MD. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia ini aktif di HMI sejak tahun 1978. Kini dirinya didapuk menjadi ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) sejak 2012 lalu.
- (5) Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum sebelum terjerat kasus korupsi adalah seorang politis hebat. Dia pernah menjadi anggota KPU pada tahun 2004. Dirinya juga ditarik masuk partai Demokrat dan terpilih menjadi anggota DPR RI tahun 2009 lalu. Kariernya menanjak dan sukses menjadi ketua umum partai Demokrat pada tahun 2010. Ia adalah mantan ketua PB HMI tahun 1997.
- (6) Zulkifli Hasan. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang juga ketua umum partai Amanat Nasional (PAN) ini adalah salah satu alumni HMI. Pernah menjadi Menteri Kehutanan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
- (7) Husni Kamil Manik. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak tahun 2012 ini adalah anggota HMI saat berkuliah di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.
- (8) Ade komaruddin. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini adalah mantan ketua HMI Cabang Ciputat saat kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah. Karier politiknya dimulai saat terpilih menjadi anggota DPR RI dari partai Golkar.
- (9) Anies Baswedan. Semasa kuliah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Anies yang sekarang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah anggota HMI yang tergabung dalam Majelis Penyelamat Organisasi.

(10) Irman Gusman. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia tiga periode (2004-2009, 2009-2014, 2014-2019) adalah anggota HMI Cabang Jakarta pada tahun 1981.

**c) Struktur Organisasi HMI**

Struktur organisasi HMI terbagi menjadi 2 (dua), yaitu (1) Struktur Kekuasaan, dan (2) Struktur Pimpinan :

- (a) Kongres
- (b) Konferensi/ Musyawarah Cabang
- (c) Rapat Anggota Komisariat

Struktur pimpinan secara hirarki terdiri dari :

- (a) Pengurus Besar HMI
- (b) Pengurus HMI Cabang
- (c) Pengurus HMI Komisariat

**d) Model Pengkaderan HMI (LK I, II, III)**

Target yang diharapkan pasca Latihan Kader (Basic Training) dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut :

- (1) Memiliki kesadaran menjalankan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari (menjalankan ibadah secara baik, teratur dan rutin)
- (2) Mampu meningkatkan kemampuan akademis (IPK meningkat)
- (3) Memiliki kesadaran akan tanggung jawab keumatan dan kebangsaan (berperan dalam kehidupan masyarakat : kampus, rumah, dll)
- (4) Memiliki kesadaran berorganisasi (aktif dalam kegiatan organisasi, kepanitiaan, dll)

Unsur-unsur Training adalah komponen yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan Latihan Kader, unsur-unsur yang dimaksud adalah :

- (1) Pengurus HMI cabang berperan dalam mengatur regulasi pelaksanaan Latihan Kader dan legalisasi atas pengukuhan kelulusan peserta yang dituangkan dalam Surat Keputusan tentang Pengukuhan dan Pengesahan Anggota Biasa Himpunan Mahasiswa Islam.

- (2) Pengurus HMI Komisariat bertanggung jawab atas terlaksananya Latihan Kader sebagai penyelenggara kegiatan.
- (3) Lembaga pengelola latihan merupakan institusi yang bertanggung jawab atas pengelola Latihan Kader.

Selain institusi diatas, terdapat unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan training secara teknis, yaitu :

- (1) Organizing Committe bertugas dan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu hal yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan kegiatan.
- (2) Steering Commitee bertugas dan bertanggung jawab atas pengarahan dan pelaksanaan latihan.
- (3) Pemandu/master of training bertugas dan bertanggung jawab untuk memimpin, mengawasi, dan mengarah latihan.
- (4) Pemateri/Instruktur/Fasilitator bertugas untuk menyampaikan materi latihan yang dipercayakan kepadanya.
- (5) Peserta adalah calon-calon kader yang telah lulus seleksi, dan telah dinyatakan sebagai peserta oleh penyelenggara.
- (6) Tim Rekam proses bertugas untuk mencatat dinamika forum yang hasilnya diberikan kepada pemandu/*master of training* sebagai pimpinan latihan.
- (7) Tim Monitoring dan Evaluasi Training bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan training agar sesuai dengan pedoman, hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada pengurus PBL HMI.

Mekanisme Pelaksanaan Kader :

- (1) Pengurus HMI Komisariat membentuk OCE dengan surat keputusan, dan membuat *out line*.
- (2) Pengurus PBL HMI membentuk SC dengan surat mendate untu mengelola latihan. Tiga hari sejak diterimanya surat permohonan dari pengurus HMI Komisariat.
- (3) SC berkoordinasi dengan pengurus HMI Komisariat dan OCE untuk membuat proposal. Selambat-lambatnya selesai satu minggu.

- (4) SC menentukan, menghubungi, dan memastikan kesediaan pemandu/*master of training* dan pemateri/fasilitator/instruktur/fasilitator latihan.
- (5) SC mengirimkan nama-nama pemandu/*master of training* kepada pengurus PBL. HMI untuk dikeluarkan surat keputusan. Selambat-lambatnya satu minggu sebelum pelaksanaan
- (6) Pengurus PBL HMI mengeluarkan surat keputusan pemandu/*master of training*. Selambat-lambatnya tiga hari sebelum pelaksanaan
- (7) Penyelenggara (Komisariat) melakukan seleksi calon peserta berkoordinasi dengan SC. Selambat-lambatnya dilaksanakan satu hari sebelum pelaksanaan.
- (8) Penyelenggara (Komisariat) menyerahkan peserta kepada pemandu/*master of training* sejak dibukanya secara latihan, selanjutnya latihan merupakan tanggung jawab pemandu/*master of training*, sampai latihan dinyatakan ditutup.
- (9) Pemandu/*master of training* menyerahkan hasil evaluasi latihan (kelulusan peserta) kepada pengurus cabang u.p ketua bidang Pembinaan Anggota Pengesahan Anggota Biasa Himpunan Mahasiswa Islam.
- (10) Pengurus HMI cabang mengeluarkan surat keputusan tentang Pengukuhan dan Pengesahan Anggota Biasa Himpunan Mahasiswa Islam.
- (11) Pemandu/*master of training*, SC, dan OCE memberikan laporan kegiatan selambat-lambatnya satu bulan setelah latihan ditutup.

Hal-hal yang penting harus dilaporkan oleh OCE, meliputi :

- (a) Gambaran umum kegiatan
- (b) Pelaksanaan kegiatan
- (c) Evaluasi
- (d) Kesimpulan dan saran
- (e) Lampiran-lampiran

Laporan disampaikan pada pengurus HMI Komisariat dan ditembuskan kepada pengurus HMI Cabang u.p ketua bidang Pembinaan Anggota.

Hal-hal penting harus dilaporkan pemandu dan SC meliputi :

- (a) Gambaran umum kegiatan
- (b) Pelaksanaan kegiatan
- (c) Evaluasi
- (d) Kesimpulan dan saran
- (e) Lampiran-lampiran

Laporan diserahkan pada pengurus Badan Pengelola Latihan.

Dalam upaya menciptakan pelaksanaan latihan training yang baik dan berkualitas diperlukan manajemen training adalah seni untuk mengatur agar terciptanya tujuan training. Berdasarkan hal tersebut, maka latihan kader merupakan training penanaman nilai/ideologi organisasi, sehingga dalam manajemen trainingnya harus mendukung pada aspek kesadaran dalam berpola pikir, sikap, dan tindak, psikomotor (20%). Hal-hal yang dimaksud dalam manajemen ini adalah :

- (1) Penyusunan jadwal materi training, jadwal training adalah sesuatu yang merupakan gambaran tentang isi dan bentuk-bentuk training. Oleh karena itu penyusunan jadwal training harus memperhatikan urutan-urutan materi pokok sebagai korelasi yang tidak berdiri sendiri.
- (2) Metode penyampaian, cara penyampaian materi pada Latihan Kader pada dasarnya harus memenuhi prinsip penyegaran dan pengembangan gagasan di tingkat pengelola, serta penyegaran gagasan dan pemahaman di tingkat peserta, dengan demikian diharapkan akan muncul gagasan-gagasan yang kreatif dan inovatif di dalam forum training. Selain itu penyampaian materi harus mencapai target/sasaran dari tujuan materi khususnya dan tujuan Latihan Kader umumnya, serta membangun suasana training/forum yang tidak menjenuhkan.

**e) Materi pengkaderan HMI**

- (1) Materi sejarah perjuangan HMI
  - (a) Pengantar Ilmu sejarah
  - (b) Misi Kelahiran Islam
  - (c) Latar belakang berdirinya HMI
  - (d) Gagasan dan Visi Pendiri HMI
  - (e) Dinamika Sejarah Perjuangan HMI Dalam Sejarah Perjuangan Bangsa
- (2) Materi Konstitusi HMI
  - (a) Pengantar Ilmu Hukum
  - (b) Ruang Lingkup Konstitusi HMI
  - (c) Pedoman-pedoman Dasar Organisasi
  - (d) Hubungan konstitusi AD/ART dengan pedoman-pedoman Organisasi Lainnya
- (3) Materi Nilai Dasar Perjuangan
  - (a) Sejarah perumusan NDP dan kedudukan NDP dalam organisasi HMI
  - (b) Garis Besar Materi NDP
  - (c) Hubungan antara Iman, Ilmu, dan Amal
- (4) Materi Misi HMI, dan
- (5) Materi Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi

**2) HMI Komisariat FKIP**

Cabang Bandung sendiri dalam penyelenggaraan training wajib khususnya LK-1 (*Basic Training*) tidak sepenuhnya mengikuti pedoman yang berlaku. Banyak sekali konten dalam pedoman yang berbenturan dengan keadaan Cabang Bandung itu sendiri, contohnya seperti waktu pelaksanaan LK-1 dan bobot materi yang terdapat dalam pedoman yang begitu jauh berbeda. Benturan antara teks pedoman dan realita tersebut sangat mengawatirkan bagi kualitas perkaderan tentunya, akan tetapi seperti yang kita ketahui kondisi Cabang Bandung saat ini yang terus tergerus dengan kuantitas minat calon kader dalam berorganisasi. Penyusunan perkaderan yang telah ada lambat laun dikesampingkan oleh aparatur HMI dalam penyelesaian LK-1, karena tidak sesuai dengan kebutuhan disetiap komisariat.

### 3) Pergerakan HMI

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang perkaderan dan perjuangan. Pergerakan HMI yang dilakukan adalah perkaderan, rekrutmen kader, kriteria kader, metode dan pendekatan rekrutmen, dan penyelenggaraan *Basic Training*. Dalam melakukan pengkaderan sehingga memungkinkan seseorang anggota HMI mengaktualisasikan potensi dirinya menjadi seorang kader muslim – intelektual – profesional, yang memiliki kualitas insan cita.

Rekrutmen kader, merupakan fokus perhatian dalam proses pengkaderan HMI guna menjamin terbentuknya *out put* yang berkualitas yang sebagaimana disyaratkan dalam tujuan organisasi, maka selain kualitas *input* calon kader menjadi faktor penentu yang tidak kalah pentingnya.

Kriteria rekrutmen, ini akan mencakup kriteria sumber-sumber kader dan kriteria kualitas calon kader. Sesuai dengan statusnya sebagai organisasi mahasiswa, maka yang menjadi sumber HMI adalah perguruan tinggi atau institut lainnya yang sederajat. Kriteria-kriteria tertentu dengan memperhatikan integritas pribadi dan calon kader, potensi dasar akademik, potensi berprestasi, potensi dasar kepemimpinan serta bersedia meningkatkan kualitas individu secara terus menerus.

Metode pendekatan rekrutmen merupakan cara atau pola yang ditempuh untuk melakukan pendekatan kepada calon-calon kader agar mereka mengenal dan tertarik menjadi kader HMI.

Penyelenggaraan *Basic Training*, maka diharapkan dalam sistem pengkaderan yang dilakukan meliputi rekrutmen, pembentukan, dan pengabdian kader. Dalam proses pembentukan kader, secara formal dibagi menjadi tiga fase, masing-masing fase ini dimulai dengan satu *training* formal ini merupakan upaya untuk memberikan kemampuan standar anggota HMI secara kualitatif.

Sebagai organisasi kader HMI mempunyai tanggung jawab menyelenggarakan perkaderan yang mengarah kepada tercapainya tujuan HMI, yaitu terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernafaskan islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.

Merujuk pada konstitusi HMI tersebut perkaderan HMI harus diorientasikan pada pergulatan visi tentang Indonesia ideal ini artinya nafas intelektualisme harus terus hidup didalam HMI. Wacana untuk mentransformasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bangsa, dan akhirnya dianggap nilai bersama. Pembentukan keIndonesiaan merupakan tugas kemusliman. Juga pergulatan dan perjuangan untuk mencapai demokratisasi mesti melekat erat dalam gerak HMI.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian (riset) adalah proses yang sistematis meliputi pengumpulan dan analisis informasi (data) dalam rangka meningkatkan pengertian tentang fenomena yang kita minati atau menjadi perhatian kita.

Pada kajian hasil penelitian terdahulu penulis memasukan satu hasil penelitian sejenis yang menggunakan analisis persepsi sebagai proses penelitian. Hasil penelitian terdahulu terkait persepsi mahasiswa terhadap satu objek dalam kajian komunikasi yaitu :

Penelitian pertama, Lestiana, Nofia. 2013. "Peran Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Semarang dalam Meningkatkan Kepemimpinan Mahasiswa". Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Makmuri. Pembimbing II Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd, 101 hlm. Menurut Lestiana, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pembinaan kepemimpinan dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dilaksanakan secara bersama dengan kegiatan lainnya seperti MAPABA di tingkat rayon, PKD ditingkat komisariat, dan PKL ditingkat cabang. Jadi, kegiatan pelatihan dan pembinaan kepemimpinan merupakan salah satu materi yang disampaikan dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Organisasi PMII dalam melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembinaan kepemimpinan mahasiswa mempunyai tujuan untuk mencetak dan membentuk kader yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Kegiatan ini menggunakan metode diskusi, ceramah dan permainan agar memudahkan komunikasi yang terjalin antar kader. Metode diskusi digunakan sebagai forum untuk bertukar informasi, pendapat, pengalaman, serta dapat bertanya jawab langsung agar pendapat pengetahuan yang lebih luas. Metode ceramah digunakan sebagai sarana transfer ilmu dari pemateri kepada peserta. Sedangkan metode permainan digunakan sebagai sarana membangun kebersamaan dan solidaritas antar peserta dan panitia. Dalam kegiatan

pelatihan dan pembinaan kepemimpinan ini, pemateri diambil dari senior-senior dan tokoh masyarakat yang dulunya merupakan aktivis Organisasi PMII. Sedangkan materi yang disampaikan dalam kegiatan ini bermacam-macam, seperti keorganisasian, teknik loby dan negoisasi, pengelolaan forum dan pengembangan link (net working). Selain melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan kepemimpinan, organisasi PMII juga mempunyai peran dalam proses kaderisasi dan pendistribusian kader di berbagai bidang kemahasiswaan. Proses kaderisasi melalui tiga pendekatan, yaitu formal, informal dan nonformal. Dalam kaderisasi formal biasanya dipenuhi dengan materi yang bersifat nilai. Kaderisasi informal lebih pada pendekatan menggunakan kebiasaan untuk meningkatkan komunikasi antar kader. Sedangkan kaderisasi nonformal berupa kursus-kursus atau pelatihan pasca kaderisasi formal. Pelatihan dan pembinaan kepemimpinan dalam organisasi PMII masuk dalam ranah pendekatan nonformal. Dalam hal pendistribusian kader, dimasing-masing Universitas banyak anggota Organisasi PMII yang memegang jabatan dalam organisasi intra kampus. Tetapi antara universitas yang satu dengan yang terjadi di IAIN Walisongo, mayoritas yang memegang jabatan pengurus di organisasi intra kampus adalah kader organisasi PMII karena memang disana basis masa organisasi PMII sangat besar. Hampir semua warga kampus IAIN Walisongo adalah orang NU.

Partisipasi politik merupakan tindakan politik yang dilakukan seseorang atau kelompok. Adapun bentuk partisipasi politik tersebut terbagi dua yaitu konvensional dan non konvensional. Bentuk partisipasi politik konvensional terdiri dari pemungutan suara, diskusi politik, kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, dan berkomunikasi secara individu dengan pejabat publik atau lobby politik, sedangkan non konvensional terdiri dari demonstrasi, pemogokan umum dan perusakan fasilitas umum.

Penelitian tesis menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang tidak lazim dilakukan karena hasil partisipasi politik ini perlu dilakukan pembuktian, dan merupakan keharusan untuk melanjutkan penelitian kuantitatif ini dengan studi empirik berdasarkan literatur media massa, wawancara, dan observasi lapangan mengenai partisipasi politik mahasiswa tersebut yang diwakili oleh kelompok gerakan mahasiswa yang terdapat di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten.

Menurut hasil pengujian diketahui bahwa sosialisasi memiliki pengaruh sangat rendah dengan tingkat korelasi ( $r$ ) sebesar  $-0,246$  dan koefisien determinasi  $6,05\%$ , sedangkan sisanya  $94\%$  ditentukan faktor-faktor lainnya. Untuk frekuensi rata-rata

partisipasi politik yang terendah pada mahasiswa Untirta adalah melakukan demonstrasi massa (2,78), berdiskusi tentang politik (3,35), berkampanye untuk calon partai politik (3,61), membaca koran tentang politik (3,84) dan berpartisipasi dalam pemogokan (3,91). Sedangkan frekuensi rata-rata partisipasi politik mahasiswa Untirta yang tertinggi adalah meyakinkan teman-teman memberi suara lama dengan diri sendiri (4,21), menghadiri pertemuan/ rapat politik (4,00) dan menghubungi para pejabat/ politisi untuk melakukan loby politik (3,98). Sementara itu hasil peringkat intensitas partisipasi politik yaitu pemogokan (35,19), petisi tertulis (26,32), demonstrasi (22,24), kampanye untuk calon partai (21,66), suka menghubungi para pejabat publik untuk loby politik (20), suka menghadiri rapat politik (16), meyakinkan teman-teman memberi sumbu sama (13), diskusi politik (7), membawa koran politik (4). Meskipun frekuensi rata-rata umumnya rendah keterkaitan tingginya intensitas kegiatan politik mahasiswa terutama aksi demonstrasi dengan gerakan mahasiswa menunjukkan signifikansi yang sangat tinggi diantara keduanya.

Kelompok gerakan mahasiswa yang memiliki keterlibatan penuh dalam tindakan aksi politik mereka melalui setiap demonstrasi yang dilakukan yaitu, BEM Untirta, FAM Untirta, FKM Untirta, Gema Baraya (Gerakan Mahasiswa Banten Raya) Untirta, Kamsat (Komite Aksi Sultan Ageng Tirtayasa), FPBM (Front Perjuangan Mahasiswa Banten), FSPB (Front Serikat Perempuan Banten), HMI, PMII, dan KAMII Komisariat Untirta, Kumala, Imala, Kumandang, Himata.

Aksi yang dilakukan dengan orientasi kepentingan mahasiswa seperti dugaan korupsi perpustakaan, beasiswa, pembelian mobil soluna dan kijing kapsul, rekening SPP, pembangunan gedung perkuliahan lantai 4, mempercepat penergian Untirta, dan penurunan biaya SPP. Sedangkan tema aksi orientasi kepentingan lokal Banten yaitu : perjuangan pendirian provinsi Banten (1999), pemilihan gubernur Banten (2001), pemilihan bupati serang (2000), petani cibaliung (2001), penculikan wartawan (2003), dan perumahan DPRD Banten (2003-2004), anggaran pembangunan DPRD Banten (2003), studi banding DPRD Banten ke China (2004), anggaran pendidikan murah (2003), kasus penambangan pasir laut di wilayah Pontang (2003-2004), pelantikan anggota DPRD Banten (2004). Aksi yang bersinggungan dengan kepentingan nasional dan pusat kekuasaan yaitu naiknya BBM, TDL, listrik, telepon (2003), dana KKN Obligasi (2003), pengadilan Akbar Tanjung di Mahkamah Agung Jakarta (2004), dsb. Serta masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu lebih rinci.

Membangun kembali pemerintahan mahasiswa ideal Untirta sebagai bagian kepentingan lembaga formal kemahasiswaan hanya dapat dipenuhi melalui prasyarat yaitu : 1) kesetaraan jabatan secara struktural organisasi kemahasiswaan dengan pihak rektorat, 2) pengelolaan otonomi keuangan bagian kemahasiswaan kembali ke mahasiswa, 3) otoritas kebebasan mimbar mahasiswa melalui pemilu raya mahasiswa, 4) membawa prioritas mini pendidikan.

Sedangkan pada kelompok gerakan mahasiswa diluar organisasi struktural internal kemahasiswaan umumnya memiliki banyak kelemahan dilihat dari manajemen organisasi ideal. Hal ini disebabkan masalah tidak adanya kemandirian organisasi secara ekonomi dan kecenderungan organisasi tersebut hanya sebagai organ taktis bersifat temporer untuk melakukan transformasi sosial dan hanya muncul ketika dibutuhkan, tak jarang persoalan independensi kerap dipertanyakan.

## **C. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kesadaran Politik**

- a. Menurut Surbakti (2007: 144), kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan (Budiardjo, 1985: 22) dalam Chandu (2013). Menurut Drs. M. Taophan, kesadaran politik adalah suatu proses batin yang menampakan keinsyafan dari setiap warga negara akan urgensi urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b. Menurut Soekanto (1982) terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, antara lain : pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku (tindakan). Pengetahuan adalah hasil dari proses mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Orang tahu harus bisa mendefinisikan materi atau objek tersebut. Pemahaman adalah hasil dari kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut dengan benar (Notoadmojo, 2003). Menurut Newcomb, sikap adalah kesediaan atau kesiapan untuk bertindak yang terdiri dari menerima, merespon, menghargai dan bertanggung jawab terhadap suatu objek. Sedangkan tindakan adalah suatu yang dilakukan atau perbuatan ([www.artikata.com](http://www.artikata.com)).

- c. Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik (Eko, 2000: 14) dalam Chandu (2012). Kesadaran politik atau keinsyafan bernegara menjadi penting dalam kehidupan kenegaraan, mengingat tugas-tugas negara bersifat menyeluruh dan kompleks. Karena itu tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat akan banyak tugas negara yang terbengkalai (Idshvoong, 2011).
- d. Jeffry M. Paige dalam Surbakti (2007: 144) menyebutkan aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya.
- e. Menurut Soekanto dalam Wardhani (2008: 8) bahwa tingkat kesadaran dapat dibagi menjadi 4 yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku (tindakan). Kesadaran politik yang terendah dapat dilihat apabila berada pada level pengetahuan dan pemahaman, sedang pada level sikap dan tinggi pada level pola perilaku/ tindakan.

## 2. Pengkaderan HMI

Menurut AS Hornby (dalam kamusnya *Oxford Advanced Learner's Dictionary*) dikatakan bahwa “*Cardre is a small group of people who are specially chosen and trained for a particular purpose*, atau “*carde is a member of this kind of group; they were ro become the cadres of the new community party*”. pengertian kader menurut Kamus Besar Indonesia (K.B.B.I) adalah seorang yang memegang peranan penting dalam pemerintahan, partai, dll (suatu struktur organisasi). Jadi pengertian kader adalah “sekelompok orang yang terorganisir secara terus menerus dan akan menjadi tulang punggung bagi kelompok yang lebih besar”. Hal ini dapat dijelaskan, pertama, seorang kader bergerak dan terbentuk dalam organisasi, mengenal aturan-aturan permainan organisasi dan tidak bermain sendiri sesuai dengan selera pribadi. Bagi HMI aturan-aturan ini sendiri dari segi nilai adalah Nilai Dasar Perjuangan (NDP) dalam pemahaman memaknai perjuangan sebagai alat untuk mentransformasikan nilai-nilai ke Islam-an yang membebaskan (*liberation force*), dan memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kaum tertindas (*mustadhafin*). Sedangkan dari segi operasionalisasi organisasi adalah AD/ART HMI, pedoman perkaderan dan pedoman serta

ketentuan organisasi lainnya. Kedua, seorang kader mempunyai komitmen yang terus menerus (permanen), tidak mengenal semangat musiman, tapi utuh dan istiqomah (konsisten) dalam memperjuangkan dan melaksanakan kebenaran. Ketiga, seorang kader memiliki bobot dan kualitas sebagai tulang punggung atau kerangka yang mampu menyangga kesatuan komunitas manusia yang lebih besar. Jadi fokus pengkaderan penekanan kaderisasi adalah aspek kualitas. Keempat, seorang kader memiliki visi dan perhatian yang serius dalam merespon dinamika sosial lingkungannya dan mampu melakukan “*Social engineering*”.

Kader HMI adalah anggota HMI yang melalui proses perkaderan sehingga memiliki ciri kader sebagaimana dikemukakan di atas dan memiliki integritas kepribadian yang utuh: beriman, berilmu dan beramal shaleh sehingga siap mengemban tugas dan amanah kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pengkaderan adalah usaha organisasi yang dilaksanakan secara sadar dan sistematis, selaras dengan pedoman perkaderan HMI sehingga memungkinkan seorang anggota HMI mengaktualisasikan potensi dirinya menjadi seorang kader Muslim – Intelektual – Profesional yang memiliki kualitas insan cita.

#### **D. Asumsi Dan Hipotesis**

##### **1. Asumsi**

Membangun kesadaran adalah suatu proses atau usaha yang tidak dapat melalui paksaan, ini hanya akan timbul dari kemauan diri sendiri begitu juga dengan membangun kesadaran partisipasi politik. Untuk membangun kesadaran politik mahasiswa yang tidak dapat adanya unsur paksaan, maka dengan ini adanya PENGKADERAN untuk mewadahi partisipasi politik mahasiswa. PENGKADERAN dibuat oleh pengurus HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) untuk mewadahi mahasiswa dalam menyampaikan partisipasi politiknya dalam pengkaderan sebagai anggota HMI.

Dengan adanya PENGKADERAN, mahasiswa bisa belajar mengemukakan pendapat, membentuk watak dan karakter, bisa menentukan pilihannya untuk menentukan roda organisasi kemahasiswaan kedepannya, dan akhirnya akan timbul kesadaran berorganisasi implementasi dari kesadaran politik dari matakuliah PPKn yang kelak dapat di terapkan di kehidupan berbangsa dan bernegara.

## 2. Hipotesis

Hipotesis adalah kesimpulan sementara atas masalah penelitian. Menurut Prof. Dr. Suharsimi Arikunto dalam bukunya *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, bahwa “hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul”. Dari arti katanya hipotesis memang berasal dua (2) penggalan kata, “*hypo*” yang artinya “di bawah” dan “*thesa*” yang artinya “kebenaran”. Jadi hipotesis yang kemudian cara penulisnya disesuaikan dengan ejaan Bahasa Indonesia menjadi hipotesa, dan berkembang menjadi hipotesis. Berdasarkan asumsi diatas penelitian merumuskan hipotesis sebagai berikut :

PENINGKATAN dapat membangun kesadaran politik mahasiswa.